

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula dalam menerima kembali hasil pembangunan.

Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah karena keberhasilan dalam pembangunan daerah akan menunjang pula keberhasilan dalam pembangunan nasional. Adanya perubahan struktur yang menyangkut pembangunan wilayah suatu daerah menjadikan daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khususnya yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan di wilayah masing-masing, sebab sukses dan tidaknya pembangunan semakin tergantung pada sukses dan tidaknya pembangunan di daerah. Keberadaan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, kota yang mampu menyelenggarakan

kelancaran dan pemerataan pembangunan mutlak diperlukan. Hubungan antara pusat dan daerah yang sering dibicarakan adalah berkaitan masalah otonomi daerah, khususnya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah yang selanjutnya dilengkapi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan otonomi, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah dalam pengambil keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung dirasakan pertama kali oleh pemerintah daerah (kabupaten atau kota). Hal ini karena masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah, sehingga penerimaan yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih banyak dalam bentuk sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Manajemen pembangunan daerah yang berjalan selama ini menunjukkan kecenderungan yang kurang serasi. Peningkatan kegiatan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antar daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan tersebut juga semakin besar.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah masing – masing guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan daerah tetap berjalan.

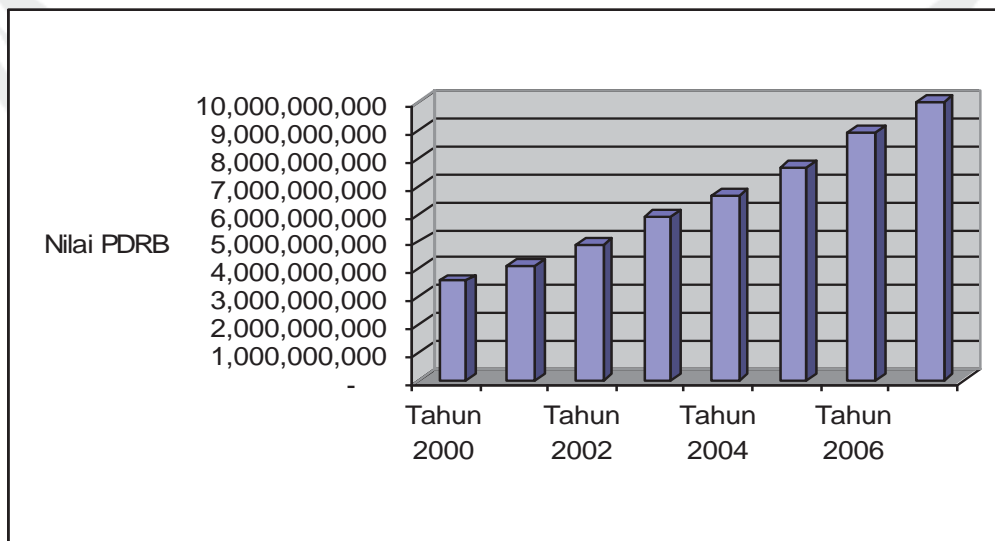
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber – sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno, 1981:187). Dapat dikatakan bahwa PAD merupakan pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas – tugas dan tanggung jawabnya. Menurut UU No.32/ 2004 Pasal 157, PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keberadaan PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita.

Tenaga kerja menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembangunan. Ketersediaan jumlah tenaga kerja yang mencukupi menjadi modal bagi kelancaran pembangunan daerah dan selanjutnya hasil pembangunan tersebut akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pemerintah daerah. Tenaga kerja menjadi salah satu elemen penting yang berperan dalam penciptaan nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Keberadaan tenaga kerja ini akan menentukan sejauhmana suatu daerah mampu meningkatkan kinerja produktivitasnya dalam menopang aktivitas pembangunan daerah.

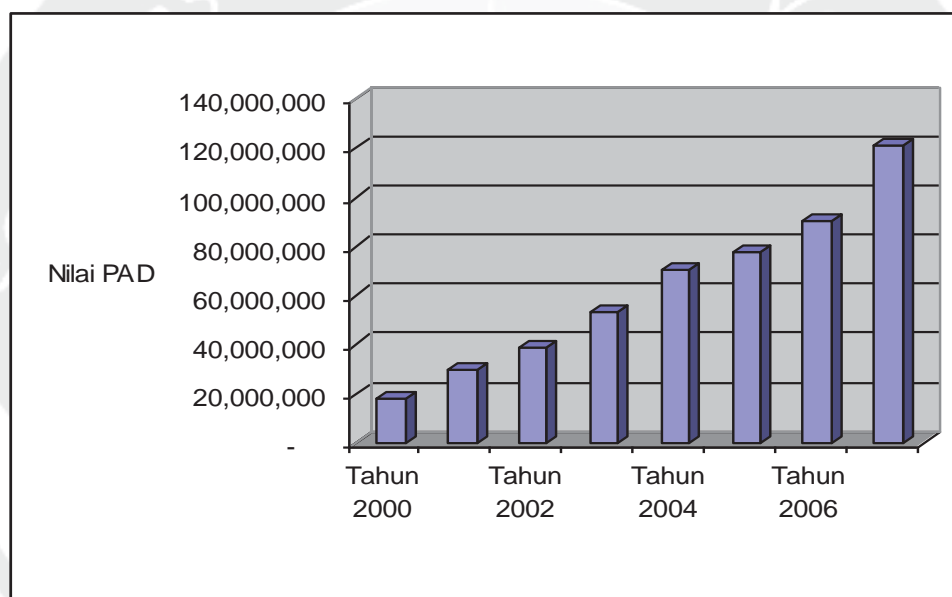
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh ketergantungan fiskal pusat-daerah yang tercermin dari dana perimbangan terhadap kemajuan ekonomi di Kabupaten Sleman. Di samping itu juga akan dikaji bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja sebagai cerminan dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah terhadap kemajuan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Selama kurun tahun 2000 – 2007, diketahui bahwa nilai PDRB Kabupaten Sleman cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu memberikan indikasi yang positif terkait dengan perkembangan pembangunan di daerah ini. Hal ini sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini.



**Gambar 1.1 : Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2007**

Trend pertumbuhan positif yang ditunjukkan oleh PDRB bisa jadi juga merupakan hasil kontribusi dari PAD. Sebab selama kurun tahun 2000 – 2007, diketahui bahwa nilai PAD Kabupaten Sleman cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu memberikan indikasi yang positif terkait dengan kemampuan daerah ini dalam menggali potensi lokalnya sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah. Hal ini sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini.



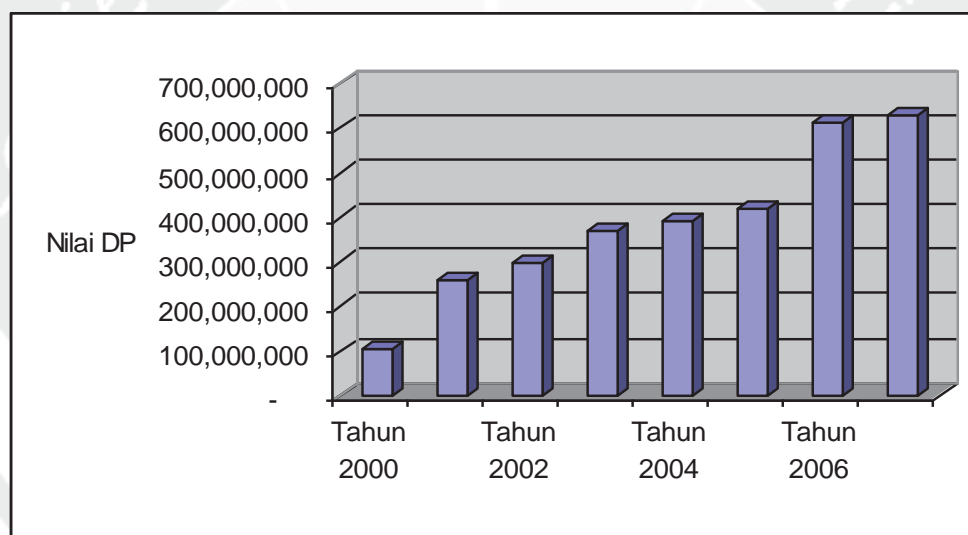
**Gambar 1.2 : Perkembangan Nilai PAD Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2007**

Namun demikian, dalam kajian tentang PDRB, fluktuasi PDRB bukan ditentukan oleh PAD sebagai satu-satunya faktor. Selain PAD juga patut dikemukakan potensi kontribusi dari Dana Perimbangan (DP) serta Tenaga Kerja (TK). Oleh sebab itu, penelitian dikembangkan dengan memasukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) serta Tenaga Kerja (TK) sebagai variabel yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap PDRB.

Secara empiris, data Dana Perimbangan (DP) di Kabupaten Sleman juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dana Perimbangan (DP) ini

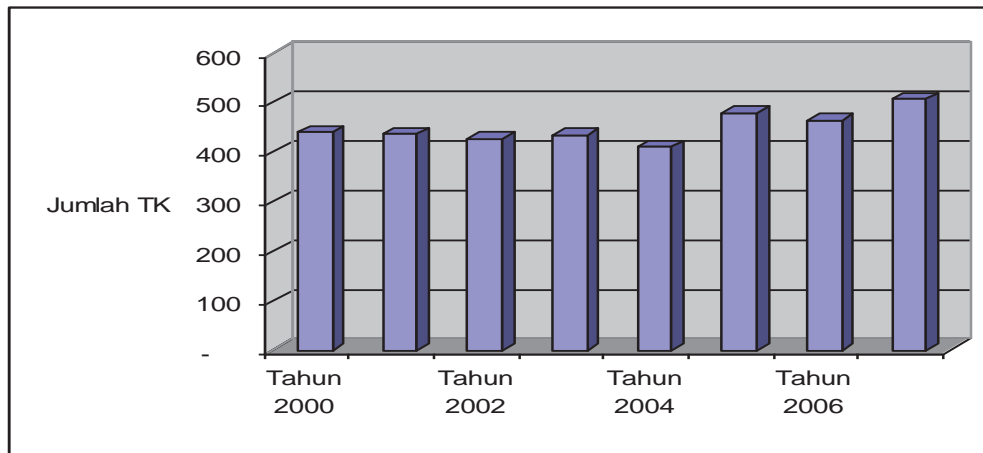
memberikan gambaran tentang sejauh mana tingkat ketergantungan Kabupaten Sleman terhadap Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan wilayahnya.

Trend yang menunjukkan adanya kenaikan nilai Dana Perimbangan (DP), menunjukkan realitas ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat yang semakin besar. Sementara penurunan nilai Dana Perimbangan (DP) menunjukkan kemandirian daerah yang semakin baik. Perkembangan nilai dana perimbangan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1.3 : Perkembangan Nilai Dana Perimbangan Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2007**

Demikian juga halnya dengan data Tenaga Kerja (TK) di Kabupaten Sleman juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun (dapat dilihat pada gambar 1.4). Hal ini tentu memberikan indikasi bahwa daerah ini memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai di satu sisi, namun juga berpotensi menciptakan permasalahan sosial di sisi lain jika tidak tertangani dengan baik.



**Gambar 1.4 : Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2007**

Kajian dalam penelitian ini lebih diarahkan untuk mengidentifikasi dan membandingkan signifikansi kontribusi dari masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan Tenaga Kerja (TK) terhadap PDRB.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Tenaga Kerja secara keseluruhan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
3. menguji dan menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
4. menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Tenaga Kerja secara keseluruhan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambilan kebijakan terkait dengan peningkatan kemandirian daerah bagi kemajuan ekonomi daerah.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi pengembangan penelitian dengan tema kemandirian daerah dan kemajuan ekonomi daerah.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan metodologi penelitian tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi PDRB.



## **1.5. Hipotesis**

Dalam penelitian ini, hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Terdapat pengaruh positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Terdapat pengaruh positif dari Dana Perimbangan (DP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
3. Terdapat pengaruh positif dari Tenaga Kerja (TK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
4. Terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan Tenaga Kerja (TK) secara simultan (bersama-sama) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## **1.6. Definisi Operasional Variabel**

### **1.6.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan seluruh nilai uang dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh Kabupaten Sleman dalam suatu tahun tertentu dan dinyatakan dalam satuan Rupiah. Data diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang dipublikasikan oleh BPS

### **1.6.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Kabupaten Sleman dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dinyatakan dalam satuan Rupiah. Data diambil dari Statistik Keuangan Daerah yang dipublikasikan oleh BPS.

### **1.6.3. Dana Perimbangan (DP)**

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten Sleman untuk membiayai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan dinyatakan dalam Rupiah. Data diambil dari Statistik Keuangan Daerah yang dipublikasikan oleh BPS.

### **1.6.4. Tenaga Kerja (TK)**

Tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja dari jumlah angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan tercatat dalam laporan statistik Kabupaten Sleman dan dinyatakan dalam satuan orang. Data diambil dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Sleman yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Sleman.

## **1.7. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II Studi Kepustakaan**

Bab ini memuat landasan teori yang relevan digunakan dalam analisis hasil penelitian serta kajian penelitian terdahulu.

### Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat deskripsi pembahasan mengenai data, model penelitian, dan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data.

### Bab IV Gambaran Umum dan Hasil Analisis

Bab ini memuat deskripsi wilayah yang diteliti dilihat dari sejarah, keadaan geografis, keadaan ekonomi serta pemerintahan. Bab ini juga mendeskripsikan hasil penelitian meliputi deskripsi data yang diteliti, hasil pengolahan data serta pembahasan.

### Bab V Kesimpulan

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian beserta saran yang relevan diberikan terkait dengan hasil yang diperoleh.